



PROSES PENGANGGARAN DI ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL SURABAYA

Muhamad Risa Farhan

21013010097@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Narisyah Evita Zharah

21013010306@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Gabrena Septi Aulia

21013010319@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Rindu Reza Budiarti

2101301037@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sheva Rajaby Eliya Trenggono

21013010334@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fajar Syaiful Akbar

fajarsa.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis : 21013010097@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *The budgeting process at the urban village level is critical to ensure that public services are effective and budgets are spent accountably. This study aims to analyze the budgeting process in the Village of Rungkut Menanggal, Surabaya, focusing on the stages of budget planning, implementation, and accountability. Using a descriptive qualitative method and a case study approach, data was collected through interviews, and documents. The results showed that the budgeting process in the village of Rungkut Menanggal has run in accordance with established procedures. Each stage of budgeting is well implemented, from planning to reporting, which ensures transparency and accountability of budget use. In conclusion, budget management in this village shows high effectiveness and contributes positively to public services. This research is expected to serve as a reference for other urban villages in improving their budgeting and financial management processes.*

Keywords: *Budgeting; neighborhoods; accountability; transparency*

Abstrak. Proses penganggaran di tingkat kelurahan sangat penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan anggaran digunakan secara akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penganggaran di Kelurahan Rungkut Menanggal, Surabaya, dengan fokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran di Kelurahan Rungkut Menanggal telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setiap tahap penganggaran dilaksanakan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kesimpulannya, pengelolaan anggaran di kelurahan ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dan memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kelurahan lain dalam meningkatkan proses penganggaran dan pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: *Penganggaran; kelurahan; akuntabilitas; transparansi*

Received Juli 30, 2024; Revised September 30, 2024; November 2, 2024

** Muhamad Risa Farhan, 21013010097@student.upnjatim.ac.id*

PENDAHULUAN

Menurut (Alimuddin & Damis, 2020) Anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Sedangkan menurut (Sari et al., 2023) Anggaran adalah hasil kegiatan (output) terpenting berwujud taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di era mendatang. Karena anggaran adalah hasil kegiatan (output), perhitungan dituangkan dalam suatu dokumen catatan yang disusun dengan cara rutin secara analitis. Anggaran diharuskan bagi mengatur sumber daya dengan bagus untuk mendekati kemampuan yang diharapkan oleh publik serta buat menciptakan kemampuan karyawan kepada publik. Anggaran sangat penting dalam pemerintahan sebab anggaran berakibat kepada kemampuan karyawan pemerintahan dalam memberikan jasa publik.

Sehingga Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam organisasi sektor publik maupun swasta. Dalam konteks pemerintahan, anggaran mencerminkan kebijakan dan prioritas yang diambil oleh pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk membiayai program dan kegiatan. Anggaran juga berperan sebagai alat akuntabilitas, memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja. Dengan melibatkan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, diharapkan kinerja aparatur pemerintah daerah akan meningkat, karena anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur hasil kerja. Dengan melibatkan semua pihak dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyusun anggaran sesuai dengan bidang masing-masing, diharapkan kinerja yang dihasilkan akan lebih baik (I Gusti Ayu Sucitrawati & Maria M. Ratna Sari, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Habibah & Sisdianto, 2024) mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi, antara lain: pertama, fungsi otorisasi, yang berarti anggaran daerah menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja untuk tahun tertentu. Kedua, fungsi perencanaan, yang menjadikan anggaran daerah sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan selama tahun tersebut. Ketiga, fungsi pengawasan, yang berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terakhir, fungsi alokasi, yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Penyusunan anggaran adalah proses perencanaan keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, untuk menentukan alokasi sumber daya yang

tersedia dalam rangka mencapai tujuan tertentu selama periode waktu yang ditetapkan, biasanya satu tahun. Proses ini melibatkan pengidentifikasian kebutuhan dan prioritas organisasi, estimasi pendapatan yang akan diperoleh, serta pengalokasian dana ke berbagai pos pengeluaran. Penyusunan anggaran merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengendalikan pengeluaran, memaksimalkan efisiensi, serta memastikan bahwa kegiatan operasional organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Dalam sektor publik, penyusunan anggaran melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan awal, konsultasi dengan pemangku kepentingan, pengajuan rancangan anggaran, hingga persetujuan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah atau parlemen. Penyusunan anggaran yang baik memerlukan keterbukaan, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hasil akhir dari proses penyusunan anggaran adalah dokumen anggaran yang menjadi dasar pengelolaan keuangan selama periode yang ditentukan. Anggaran tersebut kemudian menjadi alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja di pemerintahan daerah, yaitu: (1) kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, (2) fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. (3) sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang), (4) penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas, dan (5) keinginan yang kuat untuk berhasil (Kuntadi & Irvan Zakaria, 2022)

APBD merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya (Hairul Anam, Yanzil Azizil Yudaruddin, 2019)

Sehingga APBD dapat diartikan juga sebagai dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. APBD berperan penting dalam menentukan alokasi sumber daya ke berbagai sektor pembangunan di daerah, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah, APBD menjadi alat utama dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penganggaran merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan organisasi pemerintah yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan. Di lingkungan pemerintahan daerah, penganggaran tidak hanya bertujuan untuk menentukan alokasi dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai target kinerja dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kelurahan Rungkut Menanggal di Surabaya, proses penganggaran menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan berbagai program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

Proses penganggaran di Kelurahan Rungkut Menanggal melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilalui secara sistematis dan transparan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi. Setiap tahap ini memiliki peranan kunci dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses penganggaran di Kelurahan Rungkut Menanggal, mencakup tahapan-tahapan yang ditempuh, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik penganggaran di tingkat kelurahan serta kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Rungkut Menanggal yang bertempat di Jl. Raya Rungkut Menanggal No.11. Adapun waktu penelitian dimulai dari tanggal 25 September 2024 - 01 Oktober 2024. Untuk menyelesaikan tugas Analisis Proses Penganggaran di Organisasi Pemerintahan Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya, langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data. Data yang dibutuhkan meliputi rencana anggaran tahunan (RAPB), laporan keuangan, serta dokumen terkait alokasi dan realisasi anggaran. Selain itu, wawancara dengan pegawai kelurahan atau pemangku kepentingan juga dapat memberikan perspektif kualitatif mengenai proses penganggaran yang berjalan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dokumen untuk memahami perencanaan anggaran dan realisasinya. Dokumen yang dianalisis meliputi perbedaan antara anggaran yang diusulkan dan yang terealisasi, serta identifikasi kendala yang muncul selama proses penganggaran. Tahap selanjutnya adalah analisis proses penganggaran. Proses ini mencakup evaluasi terhadap setiap tahapan penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Analisis juga mencakup peran masing-masing pihak yang terlibat dalam penganggaran, seperti Lurah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses ini. Untuk

memperdalam pemahaman, pendekatan kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara mendalam dan survei kepada pihak-pihak terkait. Dari wawancara ini, akan dievaluasi efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam proses penganggaran di Kelurahan Rungkut Menanggal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penganggaran sektor publik di Kelurahan Rungkut Menanggal berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Usulan masyarakat dihimpun dari RT, RW, dan LPMK melalui musrenbang kelurahan. Usulan tersebut kemudian diproses melalui sistem e-budgeting yang merujuk pada Standar Satuan Harga (SSH). Proses dilanjutkan dengan aplikasi e-project untuk memastikan rencana anggaran berjalan sesuai jadwal dan e-delivery untuk memantau pencapaian proyek di lapangan. Setiap pengeluaran kelurahan terbagi dalam sub-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan penyerapan anggaran yang dicatat melalui e-controlling dan laporan keuangan disusun dalam bentuk SPJ serta diperiksa oleh inspektorat kecamatan.

Dalam perencanaan, kelurahan mengumpulkan usulan dari masyarakat yang direkapitulasi menjadi dua kategori utama: Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan. Pada tahap Musrenbang, LPMK memasukkan data usulan ke sistem dan kelurahan melakukan otorisasi. Usulan ini masuk ke sistem e-budgeting yang dikelola oleh BAPPEKO dan BPKAD. Proses e-project mengatur jadwal pelaksanaan anggaran, sedangkan e-delivery memastikan realisasi anggaran sesuai jadwal dengan pencatatan dokumen penting seperti BAST dan SPK.

Tahap pelaksanaan dalam siklus APBD dimulai melalui e-project dan ditarik ke e-delivery, yang menentukan bulan realisasi anggaran, umumnya dimulai paling cepat bulan April untuk menghindari kendala di awal tahun. Sistem e-delivery mengelola komponen seperti BAST, Surat Perintah Pembayaran, dan Kontrak SPK, dengan metode pembelian berdasarkan rentang harga: di atas 200 juta melalui lelang, 50-200 juta melalui pembelian langsung, dan di bawah 50 juta melalui pengadaan biasa. Sejak 2022, pembelian dilakukan melalui e-catalog pusat dengan kontrak SPK, dan anggaran terserap setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima diterbitkan. Proses pencairan anggaran dikelola dalam SIPK dan kemudian e-payment. Pencairan di e-payment melibatkan pembuatan SPP, verifikasi dokumen, pembuatan SPM untuk BUD (Bendahara Umum Daerah), pemeriksaan pajak oleh BUD, dan transfer dana ke rekening.

Bendahara kelurahan hanya melakukan pencairan jika ada data dari e-delivery, memastikan sinkronisasi dan akuntabilitas pencairan pada aplikasi e-payment.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara umum kelurahan yang mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran serta melaporkannya setiap bulan kepada Lurah. Belanja dan beban diakui melalui laporan tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional, sedangkan sisa anggaran dicatat sebagai SILPA untuk diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya. Tahap akhir adalah pertanggungjawaban, di mana kelurahan menyediakan dokumen seperti SPJ dan SP2D yang dikumpulkan ke kecamatan untuk pemeriksaan inspektorat. Jika terdapat perubahan kontrak, dokumen tambahan seperti addendum dan BAP dilampirkan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran yang sesuai prosedur. Seluruh dokumen ini selanjutnya diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh kementerian terkait.

KESIMPULAN

Proses penganggaran di Kelurahan Rungkut Menanggal dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efisien melalui serangkaian tahapan. Dimulai dengan perencanaan, kelurahan menggali kebutuhan warga dalam forum musyawarah yang kemudian disusun dalam sistem e-budgeting untuk alokasi dana yang sesuai. Pada tahap pelaksanaan, usulan direalisasikan melalui e-project yang memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal, sementara e-delivery dan e-payment mendukung kelancaran pencairan dana dengan pencatatan rinci. Terakhir, tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban melibatkan pelaporan yang dilengkapi dokumen pendukung dan audit inspektorat, memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana. Rekomendasi utama adalah meningkatkan keterbukaan informasi dan optimalisasi teknologi digital untuk menjaga efektivitas dan transparansi pengelolaan dana..

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, F., & Damis, H. (2018). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 108–120. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v1i1.89>
- Habibah, N., & Sisdianto, E. (2024). Manfaat Penetapan Anggaran Biaya Dan Pendapatan Sebagai Alat Pengendalian Dan Pendapatann Daerah Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4).

<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/272%0Ahttps://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/272/263>

- Hairul Anam, Yanzil Azizil Yudaruddin, D. A. (2019). *Journal of Accounting, Taxation and Finance PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*. 218–231.
- I Gusti Ayu Sucitrawati, & Maria M. Ratna Sari. (2017). Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Budaya Organisasi Dan Job Relevant Information Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 20, 1791–1819.
- Kuntadi, C., & Irvan Zakaria, M. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran: Sumber Daya Manusia, Penghargaan dan Sanksi (Literature Review). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(3), 670–676. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i3.94>
- Sari, M. S., Salma, N., & Silva, D. (2023). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(3), 2276–2280.